



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** menunjukkan bahwa nilai sebesar **85.2** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	29	26.5	88.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	28.5	28.6	95.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.8	10.6	70.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.5	19.5	78.00%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>85.8</b>	<b>85.2</b>	
<b>Predikat SAKIP</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tahun 2025 sebagai berikut:**

#### 1.) Perencanaan Kinerja

1. Sesuaikan dengan bukti dukung
2. Upload hasil perbaikan nya dengan mencantumkan informasi before after
3. Perbaiki eviden nya sesuaikan dengan pedoman

## 2.) Pengukuran Kinerja

-

## 3.) Pelaporan Kinerja

1. Bukti dukung yang disampaikan tidak menunjukan bahwa LKIP digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan kinerja
2. Data dukung tidak menjelaskan bahwa LKIP telah dijadikan dasar dalam perubahan budaya organisasi

## 4.) Evaluasi Internal

1. Tindak Lanjut Laporan Hasil Monitoring Evaluasi AKIP internal sudah ditandatangani dan dicap tetapi belum ada tanggal penandatanganan
2. Kami belum bisa memberikan penilaian karena nilai evaluasi AKIP yang Tahun 2023 belum ada data untuk dibandingkan dengan nilai tahun 2024
3. BPBD tidak mengisi efiden pada point 4.c.3

Agar disampaikan dokumen Cascading dan DPA Tahun 2025

## 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Perbaiki dengan mengupload semua dokumen Perencanaan Kinerja yang di formalkan
2. Target IKU RPD tidak boleh turun
3. Perbaiki

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Sampaikan bukti dukung yang menjelaskan bahwa LKIP digunakan untuk dasar keberhasilan kinerja
2. Sampaikan bukti dukung yang menjelaskan LKIP digunakan sebagai dasar perubahan dalam budaya organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera melengkapi waktu /tanggal penandatanganan
2. BPBD untuk memperbaiki data
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana untuk mengupload DPA BPBD

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka